

# PEDOMAN TEKNIS

## OPTIMASI LAHAN RAWA PASANG SURUT DIREKTORAT PERLUASAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN



Direktorat Jenderal  
Prasarana dan Sarana Pertanian  
Kementerian Pertanian





**Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian  
Kementerian Pertanian Republik Indonesia**

Jl. Harsono RM No. 3, Gedung D Lantai 8,  
Ragunan - Jakarta Selatan 12550  
Homepage : <http://psp.pertanian.go.id>

## KATA PENGANTAR

Pedoman Teknis Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut dimaksudkan untuk memberikan acuan dan panduan bagi para petugas Dinas Pertanian khususnya yang menangani Penanganan Lahan Rawa Pasang Surut, baik Propinsi, Kabupaten/Kota. maupun petugas lapang dalam melaksanakan kegiatan penanganan Lahan Pasang Surut yang bersumber dari dana APBN maupun dana lainnya.

pedoman teknis ini bersifat umum karena berlaku secara nasional sehingga dinas Pertanian Propinsi perlu menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan yang berisikan kebutuhan makro regional diwilayah Propinsi dan Dinas Pertanian lingkup Kabupaten/Kota perlu menerbitkan Petunjuk Teknis yang mejabarkan secara lebih rinci Pedoman Teknis ini sesuai dengan kondisi spesifik daerah masing masing

Pedoman Teknis Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut TA. 2018, menjelaskan tentang tahapan pekerjaan mulai dari ketentuan dan kriterian, serta pelaksanaan kegiatan berupa Identifikasi dan Verifikasi Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) penetapan CPCL, pembuatan disain sampai dengan pembangunan fisik.

Diharapkan Pedoman Teknis Optimasi Rawa Pasang Surut, dapat menjadi acuan bagi para petugas dalam melaksanakan Kegiatan Penanganan Lahan Rawa Pasang Surut sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik dan sesuai yang diharapkan.

Jakarta, Desember 2017  
Direktur Jenderal  
Prasarana dan Sarana Pertanian

Ir. Pending Dadit Permana, M.Ec.Dev  
NIP.196005081986031026

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	4
C. Sasaran .....	4
D. Ruang Lingkup .....	5
E. Pengertian .....	6
A. KETENTUAN & KRITERIA .....	10
B. Norma .....	10
C. Kriteria Lokasi .....	10
D. Kriteria Petani .....	11
II. PELAKSANAAN KEGIATAN .....	12
A. Persiapan .....	12
B. Pelaksanaan .....	15
C. Pembiayaan .....	15
III. PEMBINAAN DAN MONITORING .....	17
A. Pembinaan .....	17
B. Pelaporan .....	18
IV. PENGENDALIAN INTERNAL .....	22
V. INDIKATOR KINERJA .....	23
A. Indikator Keluaran .....	23
B. Indikator Hasil .....	23
C. Indikator Manfaat .....	23
D. Indikator Dampak .....	23
VI. PENUTUP .....	24

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Sejak tiga dekade terakhir, bangsa Indonesia masih dihadapkan pada masalah pangan dan kemiskinan. Permasalahan utama pangan adalah bagaimana meningkatkan kapasitas produksi nasional, sedangkan permasalahan utama kemiskinan adalah bagaimana meningkatkan pendapatan petani. Kemiskinan atau masyarakat miskin sebagian besar berada di sektor pertanian, sehingga permasalahan pokok yang dihadapi bangsa Indonesia ke depan masih terletak di sektor pertanian.

Dengan semakin pesatnya perkembangan ekonomi khususnya di Jawa, maka sektor pertanian tidak dapat dielakkan dari persaingan penggunaan sumber daya lahan dengan berbagai sektor lainnya, hal ini merupakan pemicu terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian, sehingga mengakibatkan menurunnya luas lahan pertanian yang berdampak pada penurunan jumlah produksi. Selain

alih fungsi lahan juga terjadi penurunan kualitas lahan serta fragmentasi lahan yang menyebabkan semakin sempitnya penguasaan lahan petani.

Untuk menghadapi masalah tersebut, salah satu alternatif yang perlu mendapat prioritas adalah pemanfaatan lahan rawa. Lahan rawa merupakan salah satu sumber daya lahan yang cukup besar sekitar 33,43 juta hektar tersebar di Indonesia, terutama di pulau-pulau besar seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Menurut penelitian Manwan et al., (1992) dan Nugroho et al, (1992), sebanyak 9,53 juta ha sesuai untuk kegiatan budidaya pertanian.

Berbagai kendala yang dihadapi dalam usahatani padi di lahan rawa pasang surut antara lain: (1) tingkat kesuburan lahan rendah, (2) infrastruktur yang masih belum berfungsi secara optimal, (3) tingkat pendidikan petani masih rendah, (4) indeks panen masih sekali tanam setahun, dan (5) tingginya serangan organisme pengganggu tanaman. Ke depan kontribusi lahan rawa pasang surut terhadap produksi padi akan semakin besar mengingat: (1) lahan yang dapat dijadikan sawah masih luas, (2) peningkatan produktivitas

lahan, indeks panen, melalui penerapan teknologi antara lain: penataan lahan dan sistem tata air, ameliorasi dan pemupukan, pengendalian OPT (organisme pengganggu tanaman), penanganan panen dan pasca panen.

Pembangunan pertanian dengan menerapkan inovasi dan teknologi spesifik wilayah yang dikelola secara luas dalam satu hamparan blok tersier, dan didukung pula dengan infrastruktur yang memadai, serta penggunaan mekanisasi pertanian, dapat meningkatkan produktivitas, indeks pertanaman sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Berkaitan dengan penanganan lahan pasang surut sebagai lahan produksi pangan TA 2018, pemerintah memberikan bantuan untuk perbaikan infrastruktur lahan dan air, antara lain: pembuatan/rehabilitasi saluran, pintu-pintu air, pembuatan tanggul dan lain-lain.

## **B. Maksud dan Tujuan**

### **1. Maksud**

Maksud penerbitan pedoman teknis adalah untuk menyamakan persepsi dalam pelaksanaan kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut.

### **2. Tujuan**

- Tujuan Pedoman Teknis adalah sebagai acuan bagi petugas dalam melaksanakan kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut,
- Tujuan Kegiatan adalah upaya peningkatan Intensitas Pertanaman (IP) dan produktivitas melalui perbaikan infrastruktur.

## **C. Sasaran**

Sasaran kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut adalah:

1. Petugas Dinas Pertanian Propinsi dan Kabupaten
2. Kelompok tani di lahan rawa pasang surut penerima manfaat yang berada dalam satu hamparan dan atau satu blok tersier.

3. Lahan rawa pasang surut IP  $\leq$  100 %
4. Infrastruktur yang belum sempurna

#### **D. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup kegiatan Optimasi Lahan Rawa Lebak dan Pasang Surut antara lain:

1. Persiapan
  - a. Pembuatan Petunjuk Pelaksanaan
  - b. Pembuatan Petunjuk Teknis
  - c. Pembentukan Tim Teknis
  - d. Sosialisasi
  - e. Identifikasi lahan
  - f. Desain
2. Pelaksanaan
3. Pembiayaan
4. Peyelesaian pekerjaan

## E. Pengertian

Dalam pelaksanaan kegiatan Optimasi Lahan Rawa Lebak dan Pasang Surut terdapat pengertian-pengertian/ istilah, sebagai berikut :

1. **Lahan Rawa** adalah lahan yang sering tergenang secara terus menerus akibat drainase yang kurang baik. Berdasarkan tipologinya lahan rawa dibagi menjadi dua, yaitu rawa pasang surut dan rawa lebak.
2. **Rawa Pasang surut** adalah lahan rawa (tidal swamp) yang dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut : a) Type A, lahan selalu terluapi air pasang baik pasang besar maupun pasang kecil; b) Type B, lahan yang hanya terluapi pasang besar; c) Type C, lahan yang tidak pernah terluapi walaupun pasang besar, hanya air tanah dekat permukaan < 50 cm; dan d) Type D, lahan yang tidak pernah terluapi, dan air tanah >50cm dari permukaan tanah.
3. **Stoplog** adalah pintu papan yang terdiri dari beberapa kayu yang disusun untuk menahan/ mengatur ketinggian air pada level tertentu sesuai kebutuhan.

Bila menginginkan air pasang masuk maka semua papan dibuka, dan untuk menghindari air asin masuk pada waktu pasang semua papan dipasang.

4. **Pintu klep otomatis (Flap gate)** adalah pintu dapat membuka dan menutup secara otomatis akibat perbedaan tinggi muka air di hulu dan hilir bangunan, dan dapat mengatur pemasukan air waktu pasang dan menahan pada waktu surut atau sebaliknya tergantung kebutuhan.
5. **Sistem Tabat** adalah pengelolaan tata air dengan cara memfungsikan saluran sekunder menjadi saluran penampung, dengan dipasang pintu tabat berupa stoplog untuk mengatur tinggi air di petakan lahan sesuai dengan keperluan.
6. **Sawah pasang surut** adalah sawah yang irigasinya tergantung pada gerakan pada pasang dan surut serta letaknya di wilayah datar tidak jauh dari laut. Sumber air sawah pasang surut adalah air tawar sungai yang karena adanya pengaruh pasang dan surutnya air laut

dimanfaatkan untuk mengairi melalui saluran irigasi dan drainase.

7. **Indeks Pertanaman (IP)** adalah frekuensi penanaman pada sebidang lahan pertanian untuk memproduksi bahan pangan dalam kurun waktu 1 tahun.
8. **Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK)**, adalah rincian usulan kegiatan penerima bantuan pemerintah yang disusun dalam bentuk tabulasi dengan mencantumkan uraian kegiatan/ pembelanjaan, volume/ jumlah satuan, harga satuan, spesifikasi barang dan jumlah dana serta keterangan mengenai sumber pendanaan dan metoda pelaksanaan kegiatan tersebut.
9. **Bantuan Pemerintah** adalah pembiayaan untuk kegiatan rehabilitasi rawa, pembangunan pintu–pintu air atau infrastruktur lainnya yang dilakukan melalui transfer uang dari rekening kas negara ke rekening penerima bantuan sebagai pelaksana kegiatan di lapangan, untuk dikelola sesuai dengan RUKK oleh UPKK.

**10. Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK)**

adalah Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan di kelompok yang ditetapkan oleh ketua sekurang kurangnya 1 (satu) orang dan disetujui oleh Tim Teknis serta disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). UPKK mempunyai tugas dan tanggungjawab membantu ketua untuk menguji tagihan, memerintahkan pembayaran, melaksanakan pembayaran dan mengadministrasikan/ file seluruh bukti pengeluaran.

## I. KETENTUAN DAN KRITERIA

Ketentuan dalam pelaksanaan kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut adalah sebagai berikut:

### A. Norma

Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut merupakan kegiatan upaya peningkatan peningkatan IP melalui kegiatan Rehabilitasi dan atau penyempurnaan infrastruktur seperti: pintu-pintu air, drainase, pematang, tanggul, normalisasi saluran, tabat, surjan dan lain-lain sehingga lahan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal.

### B. Kriteria Lokasi

1. Lahan yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat/petani dan belum optimal yang IP baru 100 % atau kurang dan dapat ditingkatkan menjadi IP 200 %.
2. Lokasi diutamakan pada lahan rawa pasang surut dengan type luapan B & C
3. Luas hamparan diupayakan minimal 50 ha yang berada dalam satu system hidrologi / blok tersier
4. Sudah tersedia tata air makro (primer, sekunder) yang masih berfungsi

5. Kepemilikan lahan Clear dan clean, tidak masuk dalam kawasan hutan, moratorium pengembangan lahan gambut, HGU, tidak sengketa.

#### **D. Kriteria Petani**

1. Petani tergabung dalam kelompok tani/ Gabungan kelompok tani dan atau P3A/ GP3A.
2. Kelompok tani/gapoktan wajib membentuk unit pengelola keuangan dan kegiatan (UPKK)
3. Bersedia melakukan usaha tani dan dapat meningkatkan Intensitas Pertanaman (IP) pada lahannya
4. Petani bersedia sebagian lahannya digunakan untuk bangunan infrastruktur tanpa menuntut ganti rugi
5. Berkomitmen tidak akan mengalihfungsikan lahan sawah menjadi lahan komoditas lain atau peruntukan di luar usahatani tanaman pangan.

## II. PELAKSANAAN KEGIATAN

### A. Persiapan

#### 1. Pembuatan Petunjuk Pelaksanaan

Pembuatan petunjuk pelaksanaan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi sebagai penjabaran dari pedoman teknis yang dibuat oleh Pusat sesuai dengan potensi dan kondisi wilayah.

#### 2. Pembuatan Petunjuk Teknis

Pembuatan petunjuk teknis dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota sebagai penjabaran dari petunjuk pelaksanaan dari Provinsi dan disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan.

#### 3. Pembentukan Tim Teknis

Pembentukan Tim Teknis Kabupaten/Kota dan Tim Teknis Provinsi yang disahkan oleh Kepala Dinas,

#### 4. Sosialisasi

Sosialisasi teknis pelaksanaan kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut dilakukan oleh petugas Provinsi dan Kabupaten kepada petani/kelompok tani dengan tujuan agar petani/masyarakat mengetahui tentang rencana kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut yang akan dilaksanakan, sehingga masyarakat bersedia berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

#### 5. Identifikasi lahan

- a. Pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi CPCL lahan rawa dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten dan diverifikasi oleh Dinas Pertanian Provinsi
- b. Identifikasi lahan rawa mencakup kegiatan verifikasi calon petani dan calon lokasi penerima manfaat. Hasil identifikasi yang dinyatakan layak selanjutnya dilakukan desain

## 6. Desain

- a. Desain bertujuan sebagai dokumen acuan dalam pelaksanaan kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut. Pelaksanaan Desain dilakukan oleh Dinas Pertanian Provinsi.
- b. Desain mencakup didalamnya antara lain:
  - ❖ Polygon batasan lahan yang akan dilaksanakan kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut
  - ❖ Tata letak (*layout*) seluruh alur sungai, tata letak jaringan pengairan, bangunan irigasi, drainase, jalan dan bangunan lainnya
  - ❖ Data curah hujan setra data ketinggian air saat pasang tertinggi.
  - ❖ Desain tata letak dan gambar rancangan bangunan infrastuktur yang akan dibangun (pintu–pintu air irigasi di saluran tersier maupun sub tersier, pematang, tanggul, drainase, tabat dan surjan, dll)
  - ❖ Data kepemilikan lahan petani
  - ❖ RAB sebagai dasar pembuatan RUKK

## **B. Pelaksanaan**

1. Pembangunan dan atau rehabilitasi infrastruktur disesuaikan dengan kondisi lahan yang mengacu kepada dokumen desain, antara lain: pintu air, normalisasi saluran/ pembuatan saluran, gorong-gorong, *long storage*, tanggul/galengan dan lain-lain.
2. Kegiatan ini dilaksanakan oleh kelompok tani/gapoktan dan bila perlu menggunakan alat berat, kelompok tani dapat bekerjasama dengan pihak lain.
3. Pengolahan lahan, penanaman, dan pemeliharaan tanaman dilakukan oleh petani dengan memaksimalkan infrastruktur yang telah dibangun sehingga berdampak pada peningkatan IP.

## **C. Pembiayaan**

Biaya Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut dibebankan pada Dana Tugas Pembantuan (TP) dari APBN TA. 2018 Mata Anggaran 526311 Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda.

Dana tersedia maksimal sebesar Rp. 4.000.000/Ha, namun demikian penggunaan dana disesuaikan dengan kebutuhan konstruksi dan RAB spesifik lokasi.

Komponen pembiayaan dalam kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut diutamakan untuk pembangunan fisik infrastruktur, dan sebagian diarahkan untuk kegiatan yang bersifat padat karya maksimum 30 % dari total anggaran.

Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan dilaksanakan mengacu pada (PMK) Nomor 173/PMK.05/2016 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara /Lembaga.

### III. PEMBINAAN DAN MONITORING

#### A. PEMBINAAN DAN MONITORING

##### 1. Pusat

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut TA 2018, Pusat melakukan, pembinaan, monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan di tingkat Provinsi dan Kabupaten.

##### 2. Provinsi

Provinsi melakukan Sosialisasi, Pembinaan, monitoring, evaluasi secara berkala terhadap hasil pelaksanaan kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut di tingkat Kabupaten.

##### 3. Kabupaten/Kota

Kabupaten melakukan Sosialisasi, Pembinaan, monitoring, evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut di tingkat lapangan.

## B. PELAPORAN

Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut di tingkat Propinsi dan Kabupaten, maka dibuat laporan secara berkala dari tingkat Kabupaten ke Propinsi dan dari Propinsi ke Pusat.

### 1. Format Laporan

#### a) Laporan Bulanan

Laporan Bulanan di buat oleh Dinas pertanian Kabupaten/kota dan di kirim ke Propinsi untuk di lakukan rekapitulasi. Selanjutnya hasil rekapitulasi Dinas Pertanian Propinsi di kirim ke Pusat dengan alamat :

**Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan,  
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian**  
Jl. Taman Margasatwa No 3. Ragunan, Ps. Minggu  
Jakarta Selatan 12550  
Fax no. 021 780 5552  
Email : subditoptimasilahan

Laporan bulanan selain dikirim ke Pusat, juga di laporkan melalui **Model Pelaporan Online (MPO)**

format laporan Kabupaten sebagai berikut:

Contoh						
Tabel Laporan Fisik dan Keuangan						
Kegiatan Optimalisasi Lahan Rawa Pasang Surut 2018						
Nama Dinas		:				
Kabupaten		:				
Propinsi		:				
No.	Keltan/Gapoktan	Target		Realisasi		Keterangan
		Keuangan (Rp)	Fisik (ha)	Keuangan (Rp)	Fisik Ha)	
1	Tani maju					
2	.....					

b) Laporan Tiga Bulanan

Laporan Tiga Bulanan berupa laporan perkembangan pelaksanaan fisik. Laporan ini di buat oleh Dinas pertanian Kabupaten/kota dan di kirim ke Propinsi untuk di lakukan rekapitulasi. Selanjutnya hasil rekapitulasi Dinas Pertanian Propinsi di kirim ke Pusat.

Contoh							
Tabel Laporan Fisik Komponen yang di bangun							
Kegiatan Optimalisasi Lahan Rawa Pasang Surut 2018							
Nama Dinas		:					
Kabupaten		:					
Propinsi		:					
No.	Keltan/Gapoktan	Komponen yg dibiayai	Vol	Satuan	Foto awal	Foto Akhir	Keterangan
1	Tani maju	1 rehab saluran	3	km	1		Foto awal dan akhir di ambil di posisi yg sama
					2		
					3		
2	Pintu air		5	unit	1		
					2		
					3		
					4		
					5		
3	Pematang						
4	.....						

### c) Laporan Akhir

Laporan Akhir dibuat oleh Kabupaten ke Propinsi dan dari Propinsi ke Pusat. Laporan akhir menggambarkan proses pelaksanaan, permasalahan dan kesimpulan yang dilengkapi dengan foto2 dokumentasi pelaksanaan kegiatan.

Laporan akhir di buat setelah pekerjaan fisik selesai 100%, kemudian kelompok tani menyampaikan laporan hasil pekerjaan dan membuat berita acara serah terima pekerjaan dari kelompok tani ke PPK.

Secara keseluruhan kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut yang telah selesai dilaksanakan maka pembinaan selanjutnya menjadi tanggung jawab Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten.

## 2. Bobot Pelaporan

Proses pelaksanaan kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut dimulai dari persiapan administrasi, pelaksanaan fisik dan penanaman. Tahap pelaksanaan kegiatan tersebut dapat di berikan bobot (%) sebagai berikut:

Tabel Pembobotan setiap tahap pekerjaan

No.	Komponen	Bobot (%)
1	Persiapan (Penerbitan SK-SK, Pembukaan rekening Kelompok)	30
2	Konstruksi (Pembangunan Infrastruktur)	50
3	Pengolahan dan penanaman	20
	<b>TOTAL</b>	<b>100</b>

#### IV. PENGENDALIAN INTERNAL

Dalam upaya mengawal pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target yang efektif, efisien, ekonomis, maka perlu dilakukan pengendalian terhadap kegiatan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan evaluasi, pelaporan, dan tindaklanjut melalui Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Penerapan pengendalian kegiatan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia NO 36/Permentan/RC.200/3/2014 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian serta Pedoman Umum SPI Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, dimana pengendalian akan dilakukan di tingkat Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/Kota.

Pemantauan Pengendalian Intern dapat dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, serta tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit dan review lainnya yang akan dikoordinasikan melalui Tim Satlak-PI Ditjen PSP. Sedangkan Pelaporan Pengendalian dilakukan secara berjenjang dari Kabupaten sampai ke Pusat yang dilaksanakan secara triwulan dengan jadwal sebagai berikut :

Triwulan I : disampaikan minggu I Bulan April 2018

Triwulan II : disampaikan minggu I Bulan Juli 2018

Triwulan III : disampaikan minggu I Bulan Oktober 2018

Triwulan IV : disampaikan minggu I Bulan Januari 2019

## V. INDIKATOR KINERJA

Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut maka ditentukan indikator kinerja sebagai berikut :

### A. Indikator Keluaran (Outputs)

Terbangunnya/ infrastruktur mendukung usahatani Lahan Rawa Pasang Surut

### B. Indikator Hasil (Outcomes)

Berfungsinya infrastruktur yang telah dibangun/direhab mendukung usahatani Lahan Rawa Pasang Surut

### C. Indikator Manfaat (Benefits)

1. Meningkatnya produksi dan produktifitas hasil padi
2. Meningkatnya indeks pertanaman (IP)

### D. Indikator Dampak (Impacts)

1. Termanfaatkannya lahan pasang surut secara berkelanjutan dari musim tanam satu ke musim tanam selanjutnya;
2. Terwujudnya Ketahanan Pangan Daerah dan Nasional.

## VI. PENUTUP

Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut, adalah untuk meningkatkan produktivitas dan Indeks Pertanaman terutama untuk tanaman pangan di lahan pasang surut yang selama ini terkendala oleh tingginya genangan air.

Melalui kegiatan ini diharapkan pengusahaan lahan dapat terus dipertahankan dan berkesinambungan. Peningkatan produktivitas dan Produksi, akan menjadi peningkatan ketahanan pangan lokal, yang pada akhirnya secara Nasional, menjadikan negara yang berdaulat pangan.

Kesejahteraan petani sudah seharusnya meningkat dan usaha pertanian akan menjadi pilihan yang menarik bagi masyarakat.

----- Terima kasih -----